

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

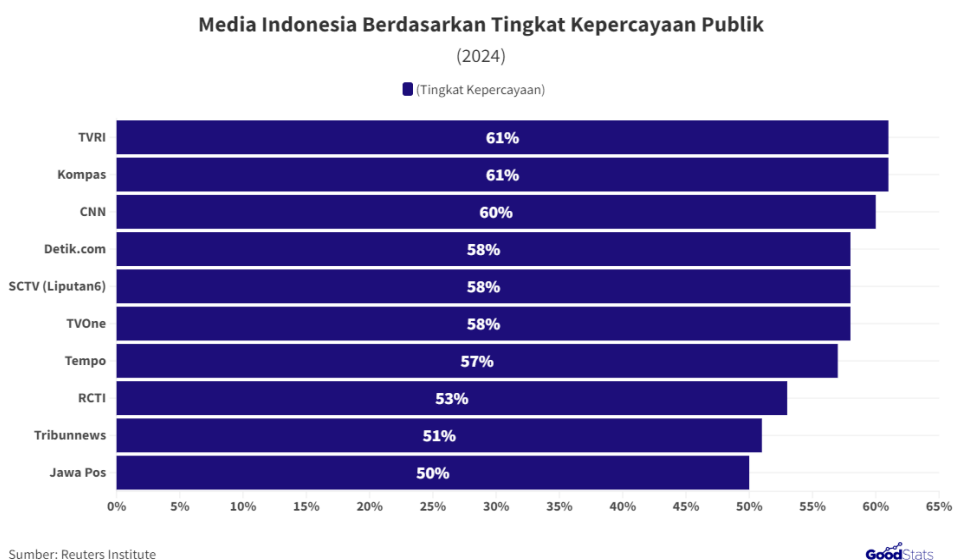
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat (UU No 32 Tahun 2002). TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No 13 Tahun 2005).

Dalam kedudukannya sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang netral, mengedukasi, dan mempromosikan kebudayaan lokal dalam berbagai programnya (Sumarmi, 2023). Hal tersebut yang membedakan TVRI dari lembaga penyiaran swasta yang berorientasi bisnis, TVRI cenderung lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan politik dan budaya (Hendriquez, 2013). Ini yang membuat pola program atau acara yang ditayangkan TVRI memiliki kerangka yang berbeda dibandingkan dengan televisi swasta, dimana televisi swasta lebih fokus pada konten hiburan demi memperoleh keuntungan finansial (McQuail, 2010).

Perbedaan entitas Lembaga Penyiaran Publik atau sering disebut dengan televisi publik dan Lembaga Penyiaran Swastaa tau televisi swasta juga ditegaskan.dalam UU No. 32 Tahun 2002. Perbedaan tersebut terletak pada penentuan siaran iklan dimana Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran, serta Lembaga Penyiaran Publik harus memuat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) Iklan Layanan Masyarakat dari siaran iklannya. Hal tersebut berbeda dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga dalam menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat. Dengan demikian, keberadaan televisi publik memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari televisi swasta yaitu orientasi televisi publik tidak ditentukan oleh pasar, melainkan oleh kepentingan publik yang lebih luas.

Keberadaan TVRI sebagai televisi publik telah mengalami perubahan dan penyesuaian sejak didirikan pada tahun 1962. Seiring perkembangan teknologi dan media baru, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sumber informasi dan hiburan yang menyebabkan berkurangnya minat terhadap tayangan TVRI. Kehadiran berbagai platform digital memberikan alternatif yang lebih beragam bagi audiens (Nur Hidayat dkk., 2024) sehingga lembaga penyiaran publik seperti TVRI harus mampu menyajikan tayangan yang tidak hanya informatif namun juga menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini (Octavia & Juwita, 2024).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LPP TVRI Semester 1 Tahun 2025, TVRI memiliki 158 pemancar digital dan total 361 pemancar analog-digital yang berhasil menjangkau 70–78% populasi nasional. Menurut Reuters Institute dalam Digital News Report 2024 yang dikutip oleh goodstats.id, TVRI berhasil masuk di antara stasiun TV lainnya sebagai media dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi di tahun 2024 dengan tingkat kepercayaan publik terhadap TVRI mencapai 61% di 2024, setara dengan Kompas (Yonatan, 2024).



Gambar 1 Media Indonesia berdasarkan Tingkat Kepercayaan Publik tahun 2024

Sumber: Yonatan, A. Z. (2024). *Jumlah Stasiun TVRI Capai 158 Stasiun di 2023*.
<https://goodstats.id/article/jumlah-stasiun-tvri-capai-158-stasiun-di-2023-2nRgN>

TVRI sendiri saat ini memiliki empat kanal siaran yaitu TVRI Nasional, TVRI Daerah, TVRI *World* dan TVRI *Sport*. TVRI Nasional merupakan saluran utama yang berfungsi sebagai media publik dalam menyampaikan isu-isu berskala nasional dan internasional, sementara 34 stasiun TVRI daerah hadir untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi, edukasi, dan hiburan masyarakat lokal tetap terakomodasi. Selain menjadi perpanjangan tangan dari TVRI Nasional, keberadaan TVRI di daerah memiliki urgensi tersendiri. Kehadiran TVRI daerah memungkinkan penyiaran yang lebih kontekstual, misalnya dalam menayangkan berita daerah, program budaya lokal, atau tayangan edukatif yang sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini penting mengingat keragaman budaya Indonesia yang tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh siaran nasional. Dengan kata lain, tanpa keberadaan TVRI daerah, potensi budaya lokal dapat terpinggirkan, dan masyarakat di daerah kehilangan ruang representasi di media publik (Sudibyo, 2010).

Lebih jauh, TVRI daerah juga berperan strategis dalam menjaga kohesi sosial. Program-program siaran lokal berfungsi sebagai sarana penguatan identitas, mempererat hubungan antar-komunitas, serta menjadi medium komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Selatan, siaran lokal TVRI menjadi media penting untuk melestarikan budaya Bugis-Makassar, terlebih lagi untuk mengedukasi publik mengenai isu-isu lokal yang spesifik, seperti pembangunan daerah, pelestarian bahasa daerah, dan tradisi budaya yang tidak ditemukan di wilayah lain. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang diusung oleh TVRI Sulawesi Selatan.

Adapun visi TVRI Sulawesi Selatan adalah terwujudnya TVRI Sulawesi Selatan Sebagai media utama Penggerak Pemersatu Bangsa dengan diiringi misi yaitu (1) Menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam beragama, (2) Menyelenggarakan layanan siaran multiplatform yang berkualitas dan berdaya saing, (3) Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, transparan dan akuntabel, (4) Menyelenggarakan pengembangan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik, serta (5) Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai.(TVRI Sulawesi Selatan, 2025).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TVRI Sulawesi Selatan tahun 2024 menyebutkan bahwa TVRI Sulawesi Selatan didukung dengan 6 pemancar di Satuan Transmisi Daerah sehingga siaran TVRI Stasiun Sulawesi Selatan dapat dikatakan menjangkau 85% wilayah Sulawesi Selatan. Dengan jumlah Penduduk Kabupaten/kota 9.460.334 jiwa penduduk menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2021 - 2024, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk potensial bagi publikasi penyiaran TVRI Stasiun Sulawesi Selatan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

Visi dan misi TVRI Sulawesi Selatan tersebut menegaskan bahwa siaran lokal tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan fondasi untuk mewujudkan TVRI sebagai entitas penyiaran publik yang kuat di daerah. Melalui siaran lokal, TVRI Sulsel dapat memperlihatkan peran pemersatu dan kemampuan untuk beradaptasi di tengah persaingan media yang semakin kompleks. Konsep entitas dalam penelitian ini juga merujuk pada eksistensi lembaga penyiaran publik yang ditunjukkan melalui ciri khas dan keunikannya. Dalam konteks TVRI Sulawesi Selatan, entitas tersebut dapat terlihat dari sejauh mana stasiun ini mampu menghasilkan program lokal tanpa harus sepenuhnya bergantung pada *relay* siaran pusat.

Identitas sebagai TV publik yang melekat pada tubuh TVRI menjadi indikator capaian kinerja tersendiri setiap tahunnya. Seperti yang dijelaskan pada Laporan Informasi Capaian Kinerja TVRI Tahun 2023 bahwa matriks capaian perjanjian kinerja TVRI meliputi, terwujudnya pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang berkualitas melalui penyiaran televisi publik. Capaian Kinerja ini yang menjadi acuan juga bagi perwakilan TVRI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk TVRI Sulawesi Selatan dalam menentukan pola acaranya.

Pemetaan pola acara termasuk salah satu strategi *programming* dari sebuah stasiun televisi, dimana dalam tahap ini terdapat proses penyeleksian dan penjadwalan sebuah program acara (Eastman & Ferguson, 2013). Pemetaan pola acara termasuk ke dalam aspek manajemen strategis siaran yang di dalam prosesnya berkaitan dengan perencanaan program yang akan disiarkan (Morissan, 2008). Lembaga penyiaran umumnya menggunakan strategi dengan secara rutin mengganti ulang penjadwalan program acara untuk tetap merebut perhatian dan menjaga ketertarikan pemirsanya (Djamal & Fachruddin, 2015).

Selain pola acara yang ada di setiap stasiun penyiaran daerah, pola acara TVRI Nasional juga dapat diikuti oleh TVRI stasiun daerah untuk

mengisi slot siaran setiap harinya. Pola acara baik di TVRI Nasional maupun TVRI daerah juga dapat berubah sewaktu-waktu dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan acara-acara kenegaraan atau acara kerjasama yang masuk di waktu tertentu.

Untuk TVRI Stasiun Penyiaran Daerah termasuk TVRI Sulawesi Selatan, penyusunan pola acara dilakukan di setiap awal tahun dan sebelum memasuki bulan Ramadhan untuk pola acara Ramadhan. Pembahasan dan evaluasi mengenai pola acara dibicarakan bersama di setiap akhir tahun (dalam Rapat Pola) serta di waktu tertentu yang diperlukan adanya perubahan pola acara. Pola acara di TVRI Sulawesi Selatan juga mengikuti peraturan dari TVRI Nasional dimana jika ada pemberitahuan mengenai wajib *relay* siaran maka program acara yang disiarkan harus mengikuti dari yang sudah dijadwalkan oleh TVRI Nasional.

Di tahun 2024, TVRI Sulawesi Selatan mengambil 10 jam siaran lokal dengan 43 program acara yang meliputi program *talkshow* seperti A Satu, Carita Campuruk Makkalak, Cinemata', Rubrik Kesehatan dan Paraikatte, program hiburan seperti Ga'de Ga'de UKM Kreatif dan Melodia, program anak seperti Balla' Dongeng, Ballakku dan Arena Anak, program religi seperti Mimbar Agama – Fokus Islami (Islam), Kabar Suka Cita (Kristen), Mimbar Agama Hindu dan Lentera Dhamma (Buddha), Senandung Religi serta Teletilawah. Selain itu, ada program budaya seperti Apresiasi Budaya, Deng Mampo dan Gelar Seni, serta program Pendidikan seperti Anak Indonesia, Inspirasi Indonesia, Pesona Indonesia, Arena Gen Z, Karebata, dan Zona Tani. Program Sulawesi Selatan Hari Ini dan Sulawesi Vision menjadi program berita di TVRI Sulawesi Selatan. Di samping itu, terdapat pula program khusus atau spesial yang hanya disiarkan di waktu tertentu, seperti program Dongeng Ramadhan (saat bulan Ramadhan), Cintaku Negeriku (program hiburan saat perayaan 17 Agustus), Hiburan Idul Fitri, Hiburan Idul Adha dan Hiburan Natal.

Namun di tahun 2025, TVRI Sulawesi Selatan hanya mengambil 4 jam siaran lokal dengan 29 program acara dikarenakan untuk mengurangi program acara yang ditayangkan berulang dan lebih memilih untuk melakukan *relay* terhadap program siaran TVRI Nasional yang lebih beragam serta bervariasi.

Perubahan pola acara di TVRI Sulawesi Selatan merupakan respons terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemampuan internal stasiun penyiaran daerah dalam melakukan

produksi program acara. Penentuan pola acara dapat ditentukan pula berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV). Laporan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) merupakan alat yang digunakan untuk menilai kualitas program-program siaran yang diselenggarakan oleh stasiun televisi, termasuk TVRI, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Laporan ini mengukur berbagai aspek kualitas siaran, seperti keseimbangan informasi, penyajian yang sesuai dengan norma sosial dan budaya, beragamnya jenis program, serta relevansi dengan kebutuhan audiens. Hasil dari laporan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana program yang disiarkan dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat dan regulator, serta dampaknya terhadap audiens.

Dalam laporan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa TVRI masih terus berusaha bersaing dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang ada (KPI, 2022a). Penilaian yang sama juga didapatkan TVRI di tahun 2023 (Laporan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2023).

Hal ini dapat menjadi acuan bagi TVRI Sulawesi Selatan dalam menyusun strategi pola acara. Strategi pola acara dapat mengedepankan mengenai keakuratan berita, *talkshow* yang edukatif, program anak, program religi dan program kebudayaan yang menarik. Sebagai televisi daerah, TVRI Sulawesi Selatan diwajibkan mampu menjawab kebutuhan informasi ataupun hiburan masyarakat Sulawesi Selatan. Setiap penayangan program acara diharapkan dapat menjawab preferensi audiens lokal sebab media berperan dalam mengarahkan pemahaman dan persepsi khalayak terhadap berbagai isu, baik yang terkait dengan identitas individu, dinamika sosial maupun kejadian-kejadian yang bersifat global (Aziz, 2024).

Pada zaman yang terus berkembang terutama di era digitalisasi media saat ini menjadikan TVRI Sulawesi Selatan harus dapat berimprovisasi dan memodernkan diri. Proses modernisasi melibatkan perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi yang bertujuan untuk membawa masyarakat menuju arah yang lebih maju (Putri dkk., 2023). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa salah satu faktor kepuasan penonton adalah visual program yang ditampilkan (Rochim dkk., 2021). Hal tersebut yang perlu ditingkatkan juga oleh TVRI Sulawesi Selatan dengan tampilan studio yang lebih modern sehingga memperlihatkan visual yang menarik perhatian penonton.

Ada banyak tantangan yang harus dihadapi TVRI, bukan hanya mempertahankan eksistensinya, namun juga memastikan bahwa pola acara yang disajikan sesuai dengan mandatnya sebagai televisi publik yang melayani kepentingan masyarakat luas, memberikan akses yang sama pada masyarakat, memiliki akuntabilitas publik dan melibatkan masyarakat seluas-luasnya (Adhrianti, 2008).

Untuk TVRI Sulawesi Selatan, beberapa program juga telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan seperti Anak Indonesia sebagai program peduli siaran perempuan dan anak terbaik dalam KPID Award 2022 (Laporan Kinerja TVRI Stasiun Sulawesi Selatan tahun 2022), dan Ga'de Ga'de yang menjadi program hiburan terbaik di KPID Award 2023 (Laporan Kinerja TVRI Stasiun Sulawesi Selatan tahun 2023). Program hiburan *Deng Mampo* Jokka-Jokka menjadi pemenang kategori Hiburan Terbaik dan program *talkshow* Paraikatte menjadi pemenang untuk kategori *Talkshow* Terbaik dalam KPID Awards 2024.

Program unggulan seperti *Deng Mampo* menjadi contoh nyata bagaimana pola acara dapat membentuk identitas TVRI Sulawesi Selatan. Masyarakat mengenali program ini bukan hanya dari konsepnya, namun juga dari pembawa acara dan nuansa lokal yang kental. Program budaya ini menunjukkan bahwa siaran lokal mampu membangun citra positif dan mendapat apresiasi publik. Program *Deng Mampo* mengangkat nilai budaya lokal yang dimiliki oleh daerah Sulawesi Selatan. Budaya lokal merupakan ekspresi unik dari nilai-nilai, kebiasaan, bahasa, dan praktik sosial yang berkembang dalam lingkungan geografis dan historis tertentu yang membentuk identitas bagi komunitas atau kelompok masyarakat yang memilikinya (Gustini dkk., 2025). Budaya lokal berperan penting dalam menjaga keunikan dan keaslian kelompok masyarakat yang bersangkutan dan membedakannya dari budaya lain.

Pola acara menjadi strategi penting dalam sebuah industri penyiaran. Pola acara tidak hanya mengatur jadwal siaran, namun juga mencerminkan pilihan strategis dalam mempertahankan identitas televisi publik. Pola acara yang konsisten akan membentuk citra TVRI di mata audiens, sehingga masyarakat memiliki ekspektasi tertentu terhadap program yang ditayangkan. Strategi dan prosedur pemetaan pola acara di TVRI Sulawesi Selatan menjadi dasar penelitian ini. Peneliti ingin melihat bagaimana TVRI Sulawesi Selatan menentukan setiap program yang ada dalam pola acara berdasarkan konsep atau acuan dari penelitian yang ada sebelumnya.

Peran *gatekeeping* juga dapat menjadi elemen penting dalam strategi pola acara TVRI Sulawesi Selatan. Fungsi ini dijalankan oleh berbagai tingkatan: mulai dari dewan pengawas dan kepala stasiun sebagai penentu arah kebijakan program, kemudian ada Ketua Tim Program dan produser yang menyusun dan memilih konten, hingga kru produksi serta pengisi acara yang memastikan isi siaran sesuai nilai budaya dan aturan penyiaran. Dari proses *gatekeeping* ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang ditayangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga memperlihatkan ciri khas TV publik daerah yang berbeda dari televisi swasta.

Penelitian terdahulu mengenai TVRI daerah menunjukkan adanya dua kecenderungan kajian utama. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Fitrih dkk., 2022) menyoroti strategi TVRI Sulawesi Selatan dalam menghadapi transformasi digital. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana TVRI Sulsel memanfaatkan media sosial, meningkatkan kualitas konten, dan melakukan adaptasi terhadap kompetisi media baru. Temuan ini memperlihatkan bahwa televisi publik daerah berupaya memperkuat eksistensinya melalui strategi eksternal, namun penelitian tersebut belum membahas secara spesifik mengenai strategi pola acara maupun peran *gatekeeping* dalam penyusunan siaran. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Kurniadi, 2020) mengkaji peran program siaran lokal pada TVRI Riau-Kepri dalam memperkuat identitas budaya Melayu. Penelitian ini menegaskan pentingnya siaran lokal sebagai sarana pelestarian budaya dan penguatan identitas masyarakat, namun lebih menekankan pada aspek isi program dibandingkan strategi manajerial penyusunan pola acara.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis strategi pola acara sebagai instrumen utama bagi TVRI daerah dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik. Kedua, fungsi *gatekeeping* dalam penentuan program siaran belum pernah dieksplorasi secara mendalam, padahal aspek ini krusial dalam menentukan konten apa yang dipilih, bagaimana program dijadwalkan, serta sejauh mana siaran lokal merepresentasikan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi pola acara TVRI Sulawesi Selatan serta fungsi *gatekeeping* yang menyertainya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan diskursus mengenai strategi penyiaran publik di era digital (Fitrih dkk., 2022) dan peran siaran lokal dalam memperkuat budaya (Anggraini & Kurniadi, 2020), namun juga menawarkan kontribusi baru berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

bagaimana pola acara sekaligus menjadi cerminan identitas dan eksistensi TVRI daerah.

Penelitian ini juga akan menganalisis mengenai strategi pola acara TVRI Sulawesi Selatan sebagai entitas TV publik dikarenakan terdapat sebuah hipotesis mengenai TVRI belum sepenuhnya netral atau terlepas dari dominasi pemerintahan (Adhrianti, 2008) dimana program acara yang dibuat untuk kepentingan pemerintah bukan kepentingan publik. Dengan mengetahui strategi tersebut diharapkan penulis akan mendapat pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mendasari perubahan dan pemilihan program acara dalam suatu pola acara guna untuk mengevaluasi dan merancang strategi penyiaran yang dapat memastikan TVRI Sulawesi Selatan tetap relevan dan efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui bagaimana penjadwalan siaran suatu lembaga penyiaran publik, namun juga sebuah proses *gatekeeping* yang menentukan eksistensi TVRI Sulsel sebagai entitas penyiaran publik di tengah persaingan media digital. Pada akhirnya, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk pengembangan TVRI Sulawesi Selatan ke depannya agar tetap menjadi *gatekeeper* atau gerbang terakhir dari banyaknya tayangan yang kurang mendidik dan tidak mengakomodir kepentingan publik dikarenakan identitas TV publik yang melekat pada TVRI tidak ada artinya jika manfaat keberadaan TVRI tidak dirasakan langsung oleh masyarakat dan kesuksesan sebuah media penyiaran juga ditentukan oleh audiens atau penontonnya (Morissan, 2008).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci:

1. Bagaimana strategi pola acara siaran lokal yang diterapkan oleh TVRI Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik?
2. Bagaimana penerapan fungsi *gatekeeping* yang dilakukan oleh TVRI Sulawesi Selatan dalam menyusun strategi pola acara siaran untuk memastikan keberagaman informasi yang disajikan sesuai dengan nilai budaya lokal?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pola acara siaran lokal TVRI Sulawesi Selatan dan menganalisis fungsi *gatekeeping* yang dilakukan oleh TVRI Sulawesi Selatan dalam menyusun strategi pola acara siaran guna melayani kebutuhan informasi, edukasi, budaya, dan hiburan masyarakat lokal.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian adalah untuk menambah khazanah literatur dalam bidang studi komunikasi massa untuk memahami strategi dan konsep pemetaan pola acara siaran lokal yang efektif bagi televisi publik dan memberikan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian sejenis mengenai televisi publik dan media lokal.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan *insight*/masukan untuk TVRI Sulawesi Selatan dalam menyusun strategi penyiaran, khususnya penguatan program acara yang bermuatan budaya dan kearifan lokal, di era digitalisasi media. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan regulator di sektor penyiaran dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlangsungan TV publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Konsep

2.1.1. TV Publik

Televisi publik adalah bagian dari lembaga penyiaran yang secara spesifik bertugas menyediakan program-program televisi yang bertujuan untuk melayani kebutuhan informasi, pendidikan, hiburan, dan pelestarian budaya masyarakat serta berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat (PP No. 11 Tahun 2005). Televisi publik biasanya dikelola oleh negara atau lembaga independen dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah, iuran masyarakat, atau donasi sehingga menghindari dominasi kepentingan pasar atau politik tertentu (Iosifidis, 2007). Adapun karakteristik dari TV publik (Adhrianti, 2008) adalah:

- Akses publik

Lembaga penyiaran publik bersedia mendirikan stasiun atau bersiaran di daerah-daerah terpencil yang umumnya tidak ingin didatangi atau dijadikan wilayah siaran dari lembaga penyiaran komersial dikarenakan di daerah tersebut dianggap tidak ada potensi keuntungan ekonomis.

- Dana publik

Lembaga penyiaran publik terutama beroperasi dengan dukungan dana publik. Misalnya melalui dana publik yang dikelola oleh pemerintah misal APBN/APBD. Dana publik juga bisa berasal dari aneka ragam kegiatan pencarian dana oleh lembaga penyiaran publik Bersama publiknya (*fund rising*) termasuk menggunakan kesempatan-kesempatan di dalam program atau penyiarannya, seperti program iklan atau sponsor.

- Akuntabilitas publik

Televisi publik harus mempertanggungjawabkan segala programnya dengan ukuran moral dan tata nilai publik yang dilayaninya (*moral accountability*) dan wajib membuat laporan kebutuhan maupun proses penggunaan uang kepada publik (*financial Accountability*).

- Keterlibatan publik

Lembaga penyiaran publik diharapkan bekerja sama seluas-luasnya, mengundang serta menyambut keterlibatan publik, khususnya melalui sebuah lembaga supervisi penyiaran publik pada tingkat-tingkat yang relevan dengan keberadaan lembaga tersebut (misal nasional atau daerah).

Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai TV Publik adalah status yang diamanatkan dan harus dijalani oleh TVRI sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. TVRI memiliki badan hukum yang jelas, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat (Sabur, 2008).

Bagian keempat tentang lembaga penyiaran Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Sementara, di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Sebagai TV Publik, TVRI diharapkan dapat lebih memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok budaya yang ada di daerah. Dalam siarannya, TV Publik harus melaporkan lebih banyak realitas di lapangan. Melalui pelaporan yang jujur dan adil, TV Publik dapat mendorong khalayak untuk bersimpati. Lebih jauh lagi, TV Publik dapat mempromosikan pengetahuan, kesadaran dan empati antar budaya, menyoroti keragaman budaya Indonesia. TV Publik dapat pula menayangkan acara-acara yang melukiskan gaya hidup berbagai kelompok suku atau ras (Mulyana, 2004).

Adapun sejarah perkembangan penyiaran Indonesia memperlihatkan pergeseran signifikan dari monopoli TVRI sejak 1962 menuju sistem multioperator dengan hadirnya televisi swasta pada akhir 1980-an. Kemunculan televisi swasta menandai era baru penyiaran dengan logika *rating* dan iklan, sehingga menggeser lanskap penyiaran nasional (Kitley, 2000). Selain itu, masuknya televisi swasta memunculkan persaingan ketat yang membuat televisi publik seperti TVRI menghadapi tantangan dalam mempertahankan mandat layanan publik (Nugroho dkk., 2012). Hal ini menimbulkan dualisme fungsi media di Indonesia dimana televisi publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan televisi swasta yang berorientasi pada kepentingan komersial.

Televisi publik idealnya menekankan keberpihakan pada kepentingan umum (*public interest programming*, *diversity*, dan edukasi budaya), sedangkan televisi swasta cenderung memprioritaskan program yang menjamin penonton dan pendapatan iklan (hiburan massal, *reality show*, sinetron, program yang *high-rating*). Televisi swasta di Indonesia yang lebih menekankan aspek hiburan massal dan memperkuat budaya konsumtif (Sudibyo, 2004) serta stasiun televisi swasta Indonesia masih sangat bergantung pada tayangan yang homogen, seperti sinetron, reality show, dan infotainment, sehingga mengurangi keragaman isi siaran (Setiadi dkk., 2021). Dengan demikian, televisi publik diidealkan sebagai media layanan sosial, sedangkan televisi swasta lebih terikat pada logika pasar.

Literatur empiris, termasuk studi kasus di Indonesia, mengidentifikasi beberapa masalah konsisten yang dialami oleh lembaga penyiaran publik seperti keterbatasan sumber daya finansial dan SDM, tekanan politis dan birokratis yang mempengaruhi independensi, persepsi publik tentang “ketinggalan” atau kurang relevan dibanding swasta, dan kebutuhan adaptasi ke lingkungan digital/multiplatform. Beberapa isu tersebut juga dihadapi oleh TVRI seperti konflik birokrasi internal, manajemen krisis reputasi, dan upaya modernisasi format dan distribusi dimana semuanya berdampak pada kemampuan TVRI memenuhi mandat layanan publik sambil tetap kompetitif (Pradhana dkk., 2024).

Di sisi lain, televisi swasta pun menghadapi persoalan serius yang telah menjadi fokus penelitian. (Sudibyo, 2004) menilai bahwa televisi swasta memperkuat hegemoni kapitalisme media dengan mengutamakan orientasi pasar. (Nugroho dkk., 2012) menekankan fenomena oligarki media di mana kepemilikan televisi swasta terkonsentrasi pada segelintir konglomerat,

sehingga independensi isi siaran sering dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi pemilik. Selain itu, dalam laporan Kinerja KPI Periode 2019-2022 juga menunjukkan bahwa televisi swasta kerap melanggar norma penyiaran dengan menayangkan konten yang sensasional, kekerasan, dan kurang mendidik (KPI, 2022b). Tantangan terbaru muncul pada era digital, dimana televisi swasta harus beradaptasi dengan fragmentasi audiens yang lebih memilih platform digital seperti YouTube dan Netflix (Setiadi dkk., 2021).

Oleh karena itu, kehadiran televisi publik memiliki mandat untuk menghadirkan siaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas melalui fungsi informasi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Namun, dalam praktiknya, televisi publik tidak berada di ruang kosong, melainkan harus berhadapan dengan dinamika persaingan industri media yang semakin kompleks. Persaingan pasar dan konvergensi digital memaksa lembaga penyiaran publik untuk berinovasi baik dalam bentuk format maupun hadir di segala *platform* tanpa kehilangan identitas layanan publik (Bardoel & d'Haenens, 2008). Situasi ini menimbulkan ketegangan yakni bagaimana televisi publik dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan preferensi audiens tanpa kehilangan identitas dan misi utamanya sebagai penyedia layanan publik. Dengan demikian, konsep televisi publik bukan hanya dipahami secara normatif sebagai media yang bebas dari kepentingan komersial, namun juga sebagai entitas yang senantiasa ditantang untuk menegosiasikan peran idealnya dalam ekosistem penyiaran modern.

2.1.2. Entitas TV Publik

Dalam kerangka teori organisasi, entitas dipahami sebagai suatu institusi yang memiliki identitas, struktur, dan legitimasi tertentu di tengah sistem sosial. Entitas didefinisikan sebagai organisasi yang dibangun berdasarkan norma, aturan, dan nilai yang memberi legitimasi terhadap eksistensinya (Scott, 2013). Dalam perspektif hukum, entitas diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan formal, hak, dan kewajiban tertentu (Saliman, 2014). Sementara itu, (Hatch & Cunliffe, 2013) menekankan bahwa entitas organisasi juga merupakan agen sosial yang mencerminkan identitas, misi, dan nilai yang diembannya.

Dalam kaitannya dengan televisi publik, konsep entitas menunjukkan bahwa TVRI bukan sekadar media penyiaran, melainkan sebuah lembaga publik yang memiliki identitas kelembagaan, misi sosial, serta tanggung jawab untuk memberikan layanan penyiaran yang independen dan non-komersial. Sebagai entitas publik, TVRI berfungsi untuk menghadirkan

program yang mencerminkan kepentingan masyarakat, menjaga keberagaman budaya, serta mendukung agenda pembangunan nasional (Nugroho dkk., 2012).

Dengan demikian, menempatkan TVRI Sulawesi Selatan sebagai entitas TV publik berarti menekankan identitasnya sebagai lembaga yang berfungsi bukan hanya sebagai penyaji program hiburan, namun juga sebagai representasi kepentingan publik lokal dalam kerangka penyiaran nasional.

2.1.3. Konsep PICON (Public Interest, Convenience, and Necessity)

Konsep PICON (*Public Interest, Convenience, and Necessity*) merupakan prinsip normatif yang berasal dari tradisi regulasi penyiaran publik, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam *The Communications Act of 1934* di Amerika Serikat. Undang-undang ini menegaskan bahwa penggunaan spektrum frekuensi penyiaran, sebagai sumber daya publik yang terbatas, harus diarahkan untuk melayani kepentingan publik, kenyamanan publik, dan kebutuhan publik (*public interest, convenience, and necessity*) (Communications Act, 1934). Prinsip ini kemudian menjadi dasar legitimasi bagi lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik, bukan semata-mata sebagai entitas bisnis yang berorientasi pasar.

Dalam sistem penyiaran Amerika Serikat, prinsip tersebut diimplementasikan dan diawasi oleh *Federal Communications Commission* yang bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan perizinan dan operasional penyiaran memenuhi standar pelayanan publik. Spektrum frekuensi dipahami sebagai *public trust*, sehingga penggunaannya harus memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi pemilik modal atau industri media (Napoli, 2001).

Komponen pertama, *Public Interest*, merujuk pada kewajiban lembaga penyiaran untuk menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti informasi yang akurat, pendidikan, penguatan nilai demokrasi, serta pelestarian budaya. Kepentingan publik dalam konteks ini tidak selalu identik dengan selera pasar atau tingkat popularitas program, melainkan berkaitan dengan nilai sosial dan fungsi strategis media dalam mendukung kehidupan demokratis.

Komponen kedua, *Convenience*, berkaitan dengan kemudahan akses publik terhadap layanan penyiaran. Aspek ini mencakup jangkauan siaran,

keteraturan jadwal, serta kemampuan lembaga penyiaran dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip *convenience* menegaskan bahwa layanan penyiaran publik harus bersifat inklusif dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas, baik secara geografis maupun sosial.

Komponen ketiga, *Necessity*, menekankan pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi yang dianggap esensial bagi masyarakat. Program-program yang memenuhi unsur *necessity* tidak selalu memiliki daya tarik komersial yang tinggi, namun memiliki nilai strategis bagi kepentingan sosial, pendidikan, budaya, dan kohesi masyarakat. Dalam kerangka ini, lembaga penyiaran publik dituntut untuk tetap menyediakan konten yang dibutuhkan publik meskipun tidak menguntungkan secara ekonomi.

Dalam konteks televisi publik, PICON berfungsi sebagai dasar ideologis dan regulatif yang membedakan lembaga penyiaran publik dari lembaga penyiaran komersial. Televisi publik tidak sepenuhnya tunduk pada logika pasar dan persaingan *rating*, melainkan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberagaman isi siaran, representasi budaya lokal, serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan hiburan yang sehat (Sudibyo, 2004).

Sejalan dengan penelitian mengenai televisi lokal di Indonesia, PICON juga digunakan sebagai prinsip dasar penyiaran publik yang membingkai pengembangan program berbasis budaya dan identitas lokal. Surokim dan Wahyudi menegaskan bahwa program televisi lokal seharusnya disusun dengan memperhatikan prinsip dasar penyiaran publik, termasuk PICON, sebagai fondasi etis dan sosial dalam pengelolaan siaran lokal (Abdussalam & Wahyudi, 2016).

Berkaitan dengan penelitian ini, konsep PICON digunakan untuk menjelaskan landasan normatif penyiaran publik yang melekat pada Televisi Republik Indonesia (TVRI), termasuk TVRI Sulawesi Selatan sebagai stasiun penyiaran daerah sebagai kerangka konseptual untuk memahami mengapa strategi penyiaran TVRI harus berorientasi pada kepentingan publik, kemudahan akses, dan kebutuhan masyarakat lokal.

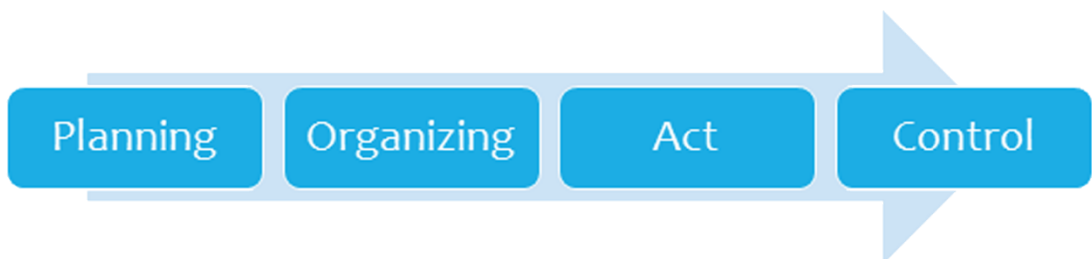
2.1.4. Manajemen

George R Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Syahputra & Aslami, 2023). George R. Terry dalam buku *Principles of Management* juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain (Sukarna, 2011).

Untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen sangat penting untuk setiap aktivitas individu atau kelompok. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas berjalan lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan untuk mencapai kesuksesan (Syahputra & Aslami, 2023).

Dalam bukunya *Principles of Management*, George R Terry membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan) (Syahputra & Aslami, 2023).



Gambar 2 Model Fungsi Manajemen George R Terry

Sumber: Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–56.

Manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) sangat relevan dengan pengelolaan sebuah stasiun televisi, terutama dalam hal menyusun strategi *programming* atau penyusunan dan pengelolaan program siaran. POAC dapat menjadi kerangka manajerial yang menggabungkan empat fungsi inti yang diperlukan untuk memastikan operasional yang efektif dan efisien. Dalam konteks televisi, setiap fungsi POAC berperan penting untuk merancang, memproduksi, mengelola, dan mengevaluasi program siaran yang sesuai dengan tujuan stasiun dan kebutuhan audiens.

Stasiun televisi seperti TVRI Sulawesi Selatan perlu mengintegrasikan semua fungsi manajemen POAC dalam proses *programming* untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Integrasi tersebut dapat dijabarkan seperti di bawah ini:

- Perencanaan (*Planning*), dilakukan dalam menentukan jenis acara yang akan disiarkan untuk memenuhi kebutuhan audiens lokal dan tujuan penyiaran publik TVRI.
- Pengorganisasian (*Organizing*), dilakukan dalam mengatur tim yang akan bertanggung jawab untuk produksi, penyuntingan (*editing*), dan siaran acara.
- Pelaksanaan (*Actuating*), dilakukan untuk memastikan bahwa acara dapat diproduksi dan disiarkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- Pengendalian (*Controlling*), dilakukan untuk memastikan bahwa acara yang disiarkan memenuhi standar kualitas dan kepuasan audiens, serta mengevaluasi *feedback* dari pemirsa untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen dalam penyiaran merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, lembaga penyiaran dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas program yang ditayangkan, serta memenuhi harapan audiens.

Dalam praktik penyiaran, rangkaian fungsi manajemen tersebut dapat diwujudkan melalui strategi *programming*, yaitu seperangkat keputusan manajerial yang berkaitan dengan pemilihan, penjadwalan, dan penataan program siaran dalam suatu struktur pola acara. Strategi *programming* menjadi jembatan antara fungsi manajemen secara konseptual dan praktik operasional penyiaran, karena melalui strategi inilah tujuan organisasi penyiaran diterjemahkan ke dalam pola acara yang berisikan program untuk ditayangkan ke audiens.

2.1.4.1. Strategi *Programming*

Programming mengacu pada sebuah pemilihan atau sebuah proses, yaitu proses seleksi penjadwalan, promosi dan evaluasi program yang didefinisikan program. Proses dalam *programming* (Eastman & Ferguson, 2013) meliputi:

- *Selecting* atau pemilihan, proses pemilihan mencakup identifikasi dan pemilihan konten yang akan ditayangkan. Ini melibatkan analisis terhadap preferensi audiens, tren pasar, dan potensi daya tarik dari program yang akan diproduksi. Eastman dan Ferguson menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan audiens untuk memastikan bahwa program yang dipilih relevan dan menarik bagi pemirsa (Putri Triyana, 2021).
- *Scheduling* atau penjadwalan, proses ini adalah strategi untuk menentukan waktu tayang program. Eastman dan Ferguson mengemukakan bahwa penjadwalan yang efektif dapat meningkatkan jumlah penonton dengan menempatkan program-program yang menjanjikan setelah program-program dengan rating tinggi. Hal ini dikenal sebagai strategi *lead-in*, di mana program baru diharapkan dapat menarik audiens dari program sebelumnya yang populer (Medeiros dkk., 2009).
- *Promotion* atau promosi, proses promosi adalah langkah penting untuk menarik perhatian audiens terhadap program yang akan ditayangkan. Eastman dan Ferguson mencatat bahwa promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat audiens terhadap program baru. Ini termasuk penggunaan iklan, teaser, dan kampanye media sosial untuk membangun antisipasi sebelum program ditayangkan (Fortunato, 2012).
- *Evaluation* atau evaluasi, proses ini mencakup analisis kinerja program setelah ditayangkan. Hal ini melibatkan pengumpulan data tentang jumlah penonton, umpan balik audiens, dan analisis rating. Eastman dan Ferguson menekankan bahwa evaluasi yang tepat dapat memberikan wawasan berharga tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk program-program mendatang (Putri Triyana, 2021). Dengan melakukan evaluasi, stasiun televisi dapat mengadaptasi strategi *programming* mereka untuk lebih baik memenuhi kebutuhan audiens.

Strategi *programming* televisi merupakan serangkaian teknik yang digunakan lembaga penyiaran untuk menarik dan mempertahankan audiens melalui penjadwalan program yang terencana. Beberapa teknik utama yang dikemukakan oleh (Eastman & Ferguson, 2013) antara lain *dayparting*, yaitu pembagian jam siaran berdasarkan kebiasaan konsumsi audiens di waktu tertentu, seperti program berita di pagi hari atau hiburan di waktu *prime time*. Selanjutnya, terdapat *stripping*, yakni penayangan program yang sama pada jam yang sama setiap hari untuk membangun kebiasaan menonton secara

konsisten. Teknik lain adalah *blocking* atau *stacking*, yang berarti menyusun program sejenis dalam satu blok waktu agar tercipta kesinambungan isi dan mengurangi potensi perpindahan saluran. Kemudian ada *anchoring* yaitu strategi dengan menempatkan program unggulan, populer atau andal di awal blok waktu untuk menarik audiens dan mempertahankannya untuk program-program berikutnya yang kurang populer atau baru.

Selain itu, Eastman dan Ferguson menjelaskan konsep *lead-in* dan *lead-out*, yaitu memanfaatkan program populer dengan rating tinggi untuk mendukung program lain yang ditayangkan sebelum atau sesudahnya. Strategi ini berkaitan erat dengan *hammocking*, yaitu menempatkan program baru atau berdaya tarik rendah di antara dua program kuat sehingga audiens terdorong untuk tetap menonton. Bentuk lain yang juga populer adalah *tent-poling*, yakni menjadikan program unggulan sebagai “tiang utama” yang menopang acara di sekitarnya. Di sisi lain, terdapat pula *counterprogramming*, yakni strategi menghadirkan program dengan genre berbeda dari pesaing pada jam tayang yang sama untuk merebut segmen audiens alternatif. Strategi seperti *counterprogramming* dapat diterapkan untuk menghadirkan alternatif tayangan yang lebih bermakna dibandingkan dominasi hiburan ringan di televisi swasta. TVRI, misalnya, dapat menayangkan program budaya lokal, pendidikan, atau diskusi publik pada jam tayang yang biasanya didominasi oleh hiburan populer di televisi swasta.

Eastman dan Ferguson juga menambahkan strategi *stunting* atau penjadwalan acara khusus dalam jangka pendek, seperti maraton episode atau program spesial, guna menciptakan perhatian publik yang lebih besar. Di era digital, strategi-strategi ini tidak hanya berlaku pada televisi konvensional, namun juga diadaptasi ke berbagai platform digital untuk mempertahankan relevansi dan menjangkau audiens yang semakin terfragmentasi. Dengan demikian, macam-macam strategi programming tersebut secara konseptual menjadi dasar dalam pembentukan pola acara yang mencerminkan kombinasi antara tujuan lembaga penyiaran, karakteristik audiens, dan dinamika kompetisi media.

Secara keseluruhan, strategi *programming* menurut Eastman dan Ferguson memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi stasiun televisi untuk merancang dan mengelola program-program mereka secara efektif. Dengan memahami dan menerapkan keempat komponen ini, stasiun televisi dapat meningkatkan daya tarik program mereka dan mempertahankan audiens yang lebih besar dalam lingkungan media yang

kompetitif. Strategi *programming* pada televisi publik diarahkan untuk memastikan keberagaman konten, keterwakilan budaya, serta pemerataan akses informasi di seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, dalam studi yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin et al mengutip Sydney W. Head yang menguraikan lima elemen yang perlu diperhatikan dalam strategi *programming*, yaitu *compatibility* (kesesuaian), *habit formation* (membangun kebiasaan), *control audience flow* (mengatur aliran pemirsa), *conservation of program resource* (pemeliharaan sumber daya program) dan *breadth appeal* (daya tarik yang luas)

Salah satu kunci dalam strategi *programming* adalah pemahaman mengenai kebiasaan penonton. Khadijah dkk. menjelaskan bahwa televisi lokal seperti Palembang Televisi (PALTV) melakukan perencanaan program jangka panjang serta menyesuaikan jadwal program dengan kebiasaan penonton, sehingga memperkuat keterhubungan dengan audiens (Khadijah dkk., 2024). Kesesuaian waktu tayang sangat penting untuk meningkatkan *engagement*, dan televisi harus memperhatikan momen-momen tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk menarik minat audiens. Strategi ini berkaitan dengan *compatibility strategy*.

Compatibility strategy merupakan pendekatan dalam strategi *programming* yang menekankan kesesuaian antara jenis program, waktu tayang, dan karakter audiens (Eastman & Ferguson, 2013). Strategi ini bekerja melalui mekanisme *dayparting* dan *audience flow*, sehingga audiens dapat berpindah dari satu program ke program berikutnya secara alami (Webster dkk., 2013). Dalam konteks studi lokal di Indonesia, konsep *compatibility strategy* sering dijelaskan melalui elemen-elemen strategi *programming* yang dikemukakan oleh Sydney W. Head, seperti kesesuaian program dengan waktu siar, segmentasi audiens, kontinuitas jadwal, serta pembentukan kebiasaan menonton (Fahrudin & Shofiya, 2019).

Untuk *control audience flow*, *bridging* dan *promo on air* dipahami sebagai teknik yang digunakan untuk menjaga kesinambungan audiens dan meningkatkan efektivitas pola acara. *Bridging* merujuk pada upaya menghubungkan satu program dengan program berikutnya melalui transisi yang halus dan kompatibel, sehingga audiens tidak terdorong untuk berpindah saluran. Selain *bridging*, *promo on air* merupakan bagian penting dari strategi *programming* karena berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung dengan audiens yang sedang menonton. *Promo on air* biasanya berupa cuplikan, pengumuman waktu tayang, atau penekanan program

berikutnya yang disisipkan di antara atau menjelang akhir program. Tujuan utama *promo on air* adalah membangun ekspektasi audiens, mengarahkan perhatian pada program selanjutnya, serta memperkuat ingatan audiens terhadap jadwal siaran.

Selain itu, segmentasi audiens juga menjadi hal penting dalam strategi *programming*. (Nicholson dkk., 2015) mengemukakan bahwa segmentasi audiens adalah alat yang esensial dalam strategi *programming*. Mereka menyatakan bahwa "*Effective programming strategies depend on the identification and targeting of audience segments, tailoring content to their preferences and viewing patterns.*" Penentuan segmentasi penonton berkaitan dengan kategori, format dan jenis produksi program itu sendiri. Segmentasi penonton akan sangat membantu tim produksi terutama tim kreatif dalam membuat materi produksi dikarenakan keinginan dari penonton yang ditargetkan sudah jelas (Munanjar dkk., 2018). Hubungan strategi *programming* dibentuk berdasarkan segmentasi audiens untuk memastikan bahwa acara yang disiarkan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari kelompok audiens tertentu. Stasiun televisi menggunakan data segmentasi untuk menentukan kapan dan jenis acara apa yang akan menarik bagi audiens tersebut.

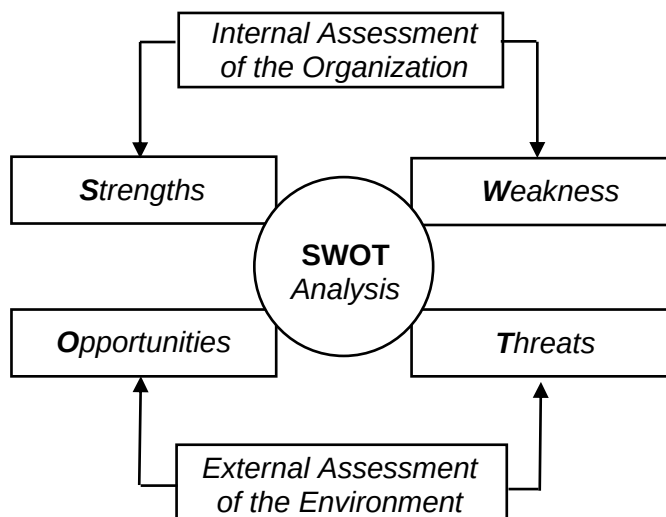
Strategi *programming* tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan dan pemilihan konten, melainkan menemukan bentuk konkretnya melalui pola acara yang ditampilkan. Pola acara merupakan manifestasi dari keputusan strategis dalam pengelolaan program, dimana setiap pilihan konten, waktu siar, dan segmentasi audiens merupakan hasil dari strategi *programming* yang telah dirancang. Untuk TVRI, pola acara merupakan implementasi nyata dari manajemen penyiaran yang terencana dan strategi *programming* yang terarah dalam menjalankan fungsinya sebagai televisi publik.

2.1.4.2. Model Analisis SWOT

Perkembangan teknologi yang cepat berubah dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi suatu perusahaan termasuk lembaga negara seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI). Suatu lembaga penyiaran juga harus memiliki strategi untuk bersaing yang tepat sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Salah satu upaya untuk mengetahui strategi yang tepat Adalah dengan menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah bentuk evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Kotler & Keller, 2016). Menurut (Rangkuti, 1998), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Peluang (*opportunities*) adalah keadaan yang menguntungkan di dalam lingkungan bisnis dimana perusahaan dapat mengambil manfaat dari kecenderungan yang ada. Perubahan teknologi serta hubungan yang lebih baik antara pembeli dan penjual juga dapat merupakan peluang. Ancaman (*threats*) adalah keadaan penting yang tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan yang terjadi di dalam sebuah lingkungan. Ancaman adalah hambatan utama bagi posisi perusahaan seperti adanya perubahan teknologi, peraturan baru, dan pesaing baru. Kekuatan (*strengths*) adalah sumber daya atau kemampuan yang dimiliki atau dapat diakses oleh suatu perusahaan yang memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Keterbatasan atau kekurangan dalam salah satu sumber daya atau kemampuan bisnis dibandingkan dengan pesaingnya dikenal sebagai kelemahan (*weaknesses*) yang menyebabkan kerugian dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien (Sari, 2020). Kaitan antara elemen analisis tersebut digambarkan dalam model berikut:



Gambar 3 Model Analisis SWOT

Sumber: Cangara, H. (2013). Perencanaan dan Strategi Komunikasi.

Konsep SWOT membedakan empat komponen kunci. Faktor internal organisasi terdiri dari kekuatan atau *strengths* (aset yang dapat diandalkan) dan kelemahan atau *weakness* (aspek yang perlu perbaikan). Di sisi lain, faktor eksternal mencakup peluang atau *opportunities* (kesempatan dari luar untuk memajukan program) dan ancaman atau *threats* (tantangan luar yang krusial bagi kelangsungan organisasi). Kedua faktor internal sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya, sementara faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi, jaringan, dan kerja sama di tengah dinamika masyarakat (Cangara, 2013).

2.1.4.3. Pola Acara

Pola acara adalah susunan program siaran dalam periode tertentu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan audiens sekaligus mencapai tujuan lembaga penyiaran (Morissan, 2008). Pola acara tidak hanya sekadar penjadwalan, namun juga strategi komunikasi media untuk membangun loyalitas penonton. Pola acara juga merupakan inti dari *media programming* yaitu seni dan ilmu dalam memilih, mengorganisasi, serta mempromosikan program agar dapat menarik dan mempertahankan perhatian khalayak (Eastman & Ferguson, 2013). Eastman dan Ferguson menyebut strategi pola acara sebagai “*programming as a plan of action*” yang berfungsi untuk menarik, mempertahankan, sekaligus mendidik audiens.

Selain itu, pola acara dijadikan sebagai bentuk regulasi internal media dalam mengatur isi siaran yang harus memperhatikan nilai sosial, budaya, dan regulasi hukum (McQuail, 2010) sehingga dapat memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial melalui televisi.

Pola acara yang efektif juga melibatkan keterlibatan preferensi lokal dan budaya, terutama pada televisi daerah. Gustini menunjukkan pentingnya representasi budaya lokal dalam program-program yang ditayangkan, yang dapat memperkuat identitas dan menarik perhatian audiens lokal (Gustini dkk., 2025). Televisi daerah harus berperan sebagai mediator dalam menyampaikan nilai-nilai budaya dan melakukan komunikasi dengan cara yang menarik, agar tetap relevan di tengah tantangan modernisasi media.

Konsep pola acara dalam strategi *programming* di televisi merupakan suatu pendekatan integral yang menyangkut perencanaan, pemilihan, dan pengelolaan program acara untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu menjaga eksistensi, menarik penonton, maupun mempromosikan konten yang relevan dengan audiens. Strategi ini dapat dilihat melalui berbagai elemen penting, di

antaranya adalah pengelolaan jadwal tayang, keberagaman konten, dan interaksi dengan audiens.

Dalam konteks televisi publik, pola acara memiliki dimensi normatif yang lebih kompleks dibandingkan televisi swasta. Melalui bukunya yang berjudul *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Sudibyo menegaskan bahwa televisi publik harus menyusun pola acara berdasarkan mandat layanan publik yang meliputi informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan sehat. Pola acara tidak hanya mencerminkan keputusan teknis dalam menjadwalkan program, namun juga menjadi representasi strategi dan visi manajemen lembaga penyiaran. Hal ini menjadikan strategi pola acara di televisi publik seperti TVRI Sulawesi Selatan bukan hanya persoalan menarik penonton sebanyak mungkin, melainkan juga memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan terjaganya identitas budaya.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Media Massa

Teori media massa merupakan kajian yang mendalami bagaimana media massa mempengaruhi masyarakat dan individu, serta bagaimana informasi disebarkan dan diterima oleh publik. Teori ini mencakup berbagai aspek termasuk pengaruh media terhadap perilaku, pembentukan opini publik, dan proses komunikasi sosial. Salah satu pendekatan utama dalam teori *mass media* adalah teori efek media yang berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh media terhadap audiens baik dalam konteks kognitif, afektif maupun perilaku (Valkenburg, 2022).

Teori media massa juga mencakup aspek regulasi dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, media diharapkan untuk beroperasi demi kepentingan publik meskipun sering kali terdapat tekanan dari kepentingan swasta dan politik yang dapat memengaruhi kebijakan media (Ginosar & Krispil, 2016). Penting untuk memahami bagaimana regulasi media dapat memfasilitasi atau menghambat fungsi media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat (Girard, 2015).

Teori media massa memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana media berfungsi dalam masyarakat, bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok, serta bagaimana mereka dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam konteks penelitian mengenai strategi pola acara siaran lokal TVRI Sulawesi

Selatan sebagai entitas televisi publik, sejumlah teori media massa dapat dijadikan landasan konseptual.

Dalam menganalisis strategi pola acara siaran lokal TVRI Sulawesi Selatan sebagai entitas televisi publik, teori media massa tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan perlu ditempatkan dalam kerangka yang saling melengkapi. Teori *Agenda Setting* (McCombs & Shaw, 1972) menekankan bagaimana media memiliki kekuatan untuk memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam konteks TVRI, strategi pola acara mencerminkan upaya lembaga penyiaran publik untuk menempatkan isu-isu lokal, kebudayaan, dan pendidikan sebagai agenda utama yang layak mendapat perhatian khalayak. Namun, efek agenda media tidak serta-merta berlangsung satu arah, karena audiens sendiri memiliki kebutuhan dan motivasi yang beragam sebagaimana dijelaskan dalam teori *Uses and Gratifications* (Katz dkk., 1973). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pola acara TVRI sangat ditentukan oleh sejauh mana konten siaran mampu memenuhi kepuasan audiens, baik dalam hal hiburan, informasi, maupun identitas sosial.

Selanjutnya, dalam teori *Cultivation* (Gerbner & Gross, 1976) menambahkan dimensi jangka panjang, di mana eksposur yang berkesinambungan terhadap program televisi berpotensi membentuk persepsi dan orientasi sosial masyarakat. TVRI sebagai televisi publik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pola acara yang dirancang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga menanamkan nilai budaya dan identitas kedaerahan. Namun, menurut teori *Encoding/Decoding* (Hall, 1980) makna yang dikodekan oleh lembaga penyiaran tidak selalu diterima secara homogen. Audiens dapat menafsirkan pesan dalam kerangka dominan-hegemonik, negosiasi, atau bahkan oposisi. Dalam kasus TVRI Sulawesi Selatan, hal ini menunjukkan bahwa strategi penyusunan pola acara harus mempertimbangkan keberagaman latar sosial, pendidikan, dan budaya audiens lokal, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih inklusif.

Teori *Media Dependency* (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976) juga menggarisbawahi keterhubungan antara individu, media, dan sistem sosial. Semakin tinggi ketergantungan masyarakat terhadap media untuk memenuhi kebutuhan informasi, orientasi, dan hiburan, semakin besar pula pengaruh media tersebut dalam membentuk pandangan dan perilaku. Dalam kerangka ini, strategi pola acara siaran lokal TVRI tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, namun juga sebagai mekanisme yang memperkuat

hubungan antara masyarakat dengan televisi publik, khususnya dalam membangun kepercayaan dan relevansi di tengah maraknya media swasta maupun digital.

Sejumlah teori media massa seperti *agenda setting*, *uses and gratifications*, dan *cultivation theory* pada dasarnya lebih menekankan hubungan antara media dan audiens. Teori *agenda setting* mengukur bagaimana isu yang diangkat media berpengaruh terhadap persepsi khalayak mengenai isu penting. Teori *uses and gratifications* berfokus pada motivasi serta kepuasan audiens dalam memilih media sesuai kebutuhannya. Sementara itu, *cultivation theory* melihat pada dampak jangka panjang media, khususnya televisi, terhadap pembentukan persepsi sosial audiens. Ketiganya memerlukan keterlibatan data dari audiens melalui survei, wawancara, maupun analisis persepsi publik. Sementara penelitian ini tidak mengambil sampel dari audiens, melainkan berfokus pada TVRI Sulawesi Selatan sebagai subjek penelitian, maka teori *Encoding/Decoding* (Hall, 1980) dipandang lebih relevan untuk menjelaskan bagaimana lembaga penyiaran publik seperti TVRI mengonstruksi makna melalui strategi *programming* yang dilakukan. Teori ini tidak hanya menempatkan media sebagai pengirim pesan, namun juga sebagai institusi sosial yang mengkodekan nilai-nilai tertentu dalam program siarannya.

TVRI Sulawesi Selatan merupakan bagian dari media massa dalam bentuk penyiaran televisi. Hal ini menempatkan fokus kajian pada TVRI Sulawesi Selatan sebagai komunikator yang memiliki peran strategis dalam menyusun pola acara siaran lokal. Televisi adalah bagian dari "The Big Five" media massa yang memiliki peran sangat penting dalam komunikasi dan penyebaran informasi di masyarakat. Televisi, khususnya, telah menjadi salah satu sumber utama informasi dan hiburan bagi banyak orang di seluruh dunia. Dalam konteks ini, televisi tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan berita, namun juga sebagai alat untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku sosial (Hutasoit & Gusfa, 2020) sehingga strategi pola acara siaran lokal penting untuk memperkuat fungsi TVRI sebagai entitas televisi publik di daerah.

2.2.2. Teori *Encoding/Decoding*

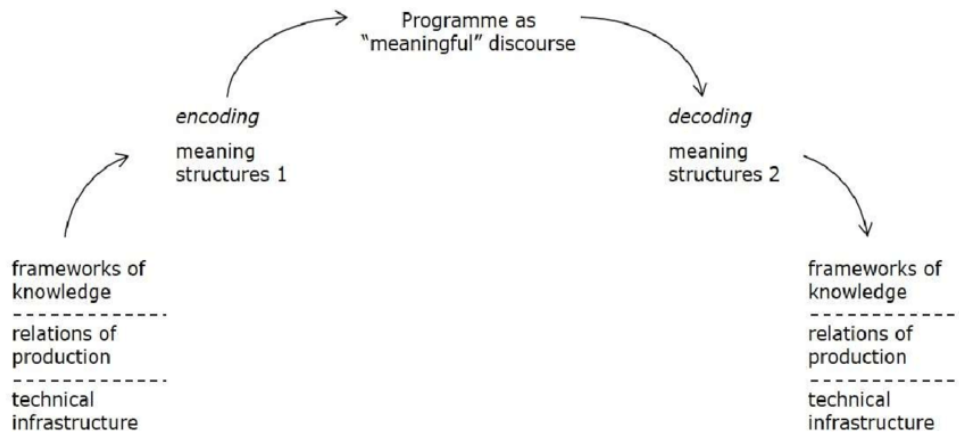
Salah satu studi yang ada dalam komunikasi massa adalah Teori *Encoding/Decoding* yang diperkenalkan oleh Stuart Hall dalam karyanya yang berjudul "*Encoding and Decoding in the Television Discourse*" yang terbit di tahun 1973 dan menjadi salah satu karya penting dalam tradisi

Cultural Studies di Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), University of Birmingham. Teori ini lahir sebagai kritik dan memandang proses komunikasi sebagai mekanisme yang lebih kompleks dan non-linear dibandingkan model komunikasi tradisional yang bersifat penyampaian pesan dari pengirim ke penerima atau hubungan satu arah antara pengirim (*sender*) dan penerima (*receiver*) (Hall, 1973).

Hall berpendapat bahwa komunikasi massa, khususnya televisi, tidak dapat dipahami hanya sebagai proses transmisi pesan, melainkan sebagai proses produksi dan reproduksi makna (*production and reproduction of meaning*). Dalam pandangan ini, media bukan sekadar menyampaikan informasi, namun juga melakukan proses pengkodean (*encoding*) terhadap pesan-pesan yang sarat dengan ideologi, nilai sosial, dan kepentingan tertentu. Pesan-pesan tersebut kemudian diterima dan diinterpretasikan oleh audiens melalui proses penguraian makna atau *decoding*, yang hasilnya bisa berbeda dari maksud awal produsen pesan.

Encoding merujuk pada proses dimana pembuat media atau produsen pesan mengekspresikan makna tertentu ke dalam teks media melalui penggunaan kode dan simbol. Pada fase ini, pesan dilengkapi dengan makna-makna yang dianggap sesuai oleh pembuatnya dan didasarkan pada ideologi dan tujuan tertentu (Hall, 1980).

Decoding, di sisi lain, adalah proses interpretasi oleh audiens terhadap pesan yang diterimanya. Hall menegaskan bahwa *decoding* tidak selalu berlangsung sama, dan interpretasi audiens dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang sosial, budaya, ideologi, dan pengalaman masing-masing (Hall, 1980). Hall mengidentifikasi tiga posisi *decoding* utama yaitu *Dominant-Hegemonic Position* (audiens menerima pesan sesuai dengan makna yang diinginkan oleh produsen), *Negotiated Position* (audiens berada di posisi tawar), dan *Oppositional Position* (audiens menolak makna dominan dan melakukan pembacaan alternatif yang bertentangan dengan maksud produsen pesan).



Gambar 4 Model Encoding/Decoding Stuart Hall (Patma dkk., 2025)

Kekuatan dari teori Hall ini masih digunakan dalam beberapa studi terbaru terutama saat penyiaran politik menjelang Pemilu. Teori *Encoding Hall* menangkap bagaimana pesan politik dikodekan oleh media dalam penelitian "*Political Communication in Television Media: A Study of Encoding/Decoding on Voters in the 2024 Election*" yang dilakukan oleh (Iswarinda dkk., 2025). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa salah satu lembaga penyiaran swasta berusaha membangun asosiasi positif antara salah satu calon presiden dan religiusitas. Adapun tujuan pengkodean lembaga penyiaran swasta adalah untuk membentuk citra positif namun proses menafsirkan pesan-pesan ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pemirsa yang memiliki literasi politik lebih tinggi mampu membaca simbol tersebut sebagai bagian dari agenda politik tersembunyi. Para audiens dapat melihat simbol itu sebagai taktik manipulasi yang mengeksploitasi kesucian agama untuk keuntungan politik (Iswarinda dkk., 2025).

Studi lain yang menggunakan kerangka Hall untuk acara televisi seperti yang dilakukan oleh (Amalia dkk., 2022) dalam meneliti resepsi program pendidikan televisi dan menelaah proses *encoding* nilai pendidikan pada teks acara serta posisi pembacaan para guru sebagai audiens. Studi ini juga menggunakan pendekatan resepsi (interview kualitatif) untuk mengidentifikasi posisi *dominant*, *negotiated*, dan *oppositional* pada informan.

Dalam konteks penelitian ini, teori *Encoding/Decoding* dari Stuart Hall ini tidak digunakan untuk menganalisis proses penerimaan audiens, melainkan untuk memahami bagaimana lembaga penyiaran publik,

khususnya TVRI Sulawesi Selatan, melakukan proses pengkodean (*encoding*) terhadap nilai-nilai publik, budaya lokal, dan identitas kebangsaan melalui strategi pola acara siaran lokal.

Berbeda dari penelitian resepsi audiens yang berfokus pada proses *decoding*, studi ini menitikberatkan pada tahap produksi makna, yakni bagaimana struktur kelembagaan TVRI sebagai entitas publik menerjemahkan mandat pelayanan publik ke dalam kebijakan program, penjadwalan, serta format siaran. Dalam konteks ini, strategi *programming* bukan hanya persoalan teknis penataan acara, melainkan juga representasi dari ideologi media publik yang berupaya menyeimbangkan fungsi edukatif, informatif, dan kultural. Dengan menggunakan kerangka *Encoding/Decoding*, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana strategi pola acara TVRI mencerminkan proses institusionalisasi makna publik. Pola siaran yang dipilih, jenis program yang ditonjolkan, serta representasi budaya lokal yang diangkat merupakan bentuk *encoding* terhadap nilai-nilai publik dan kebijakan penyiaran nasional.

Melalui perspektif ini, TVRI Sulawesi Selatan diposisikan bukan hanya sebagai subjek penelitian, namun juga sebagai spektrum representatif yang mencerminkan dinamika *encoding* media publik di Indonesia dan bagaimana ideologi pelayanan publik diterjemahkan ke dalam praktik penyiaran lokal yang berakar pada budaya masyarakat setempat. Analisis ini akan memperlihatkan bagaimana pola acara yang dibentuk oleh TVRI Sulawesi Selatan menjadi wujud konkret dari proses *encoding* nilai-nilai publik, yang sekaligus memperlihatkan posisi unik televisi publik dalam lanskap penyiaran nasional yang semakin kompetitif dan digital.

2.2.3. Teori Gatekeeping

Gatekeeping adalah konsep fundamental dalam teori media massa yang berasal dari karya White yang menganalisis bagaimana informasi disaring melalui organisasi media sebelum mencapai publik. Teori ini menjelaskan proses pengambilan keputusan pembuat berita seperti editor, reporter, dan produser yang memilih dan menentukan informasi untuk disebarluaskan.

Konsep gatekeeping pertama kali diperkenalkan oleh psikolog asal Australia, Kurt Lewin, pada tahun 1947 dalam karyanya yang berjudul *Human Relations*. Teori ini menggambarkan proses seleksi informasi sebagai suatu "gerbang" yang mengontrol aliran informasi ke masyarakat (Palka-Suchojad, 2021). Lewin menekankan peran kekuatan sosial dan faktor kontekstual

dalam proses pengambilan keputusan terkait aliran informasi. Pendekatan Lewin mengkonseptualisasikan masyarakat dan interaksi sosial sebagai "medan" kekuatan yang memengaruhi perilaku dan hasil, termasuk informasi apa yang diizinkan melewati saluran sosial.

Lewin memperkenalkan gagasan bahwa *gatekeeping* adalah proses situasional dan ideologis. Secara situasional, penjaga gerbang bergantung pada keadaan saat ini; secara ideologis, hal itu dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan struktur kekuasaan jangka panjang. Gerbang yang dimaksud adalah metafora untuk hambatan sosial atau titik keputusan yang mengontrol aliran informasi, dan penjaga gerbang adalah mereka yang menjalankan kekuasaan dengan membuat keputusan tentang informasi apa yang diizinkan melewati hambatan ini. *Gatekeeping* dilihat sebagai proses dinamis yang tertanam dalam bidang sosial di mana berbagai kekuatan baik organisasi, budaya, atau individu membentuk keputusan yang diambil di gerbang.

Menurut Lewin *gatekeeping* bukanlah proses statis, namun terjadi dalam sistem kompleks kekuatan yang saling terkait yang dapat berubah seiring waktu. Hal ini melibatkan pemeriksaan bagaimana kekuatan-kekuatan tersebut memengaruhi perilaku penjaga gerbang dan aliran informasi yang dihasilkan, dengan menekankan bahwa perubahan sosial atau perlawanan dapat mengubah hasil dari *gatekeeping* (Deluliis, 2015).

Selain itu, teori dari Lewin mengkonseptualisasikan lingkungan sosial sebagai "medan" dinamis yang terdiri dari berbagai tingkat yang saling berhubungan yang memengaruhi perilaku. Tingkat-tingkat ini mengatur bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks sosial mereka. Keempat tingkatan tersebut antara lain (Deluliis, 2015):

- *Microsystem* (Konteks Langsung), tingkat terdekat dengan individu dan mencakup interaksi dan pengaturan langsung, seperti keluarga, teman, rekan kerja, atau lingkungan kerja tertentu. Keputusan dan perilaku sangat dipengaruhi oleh hubungan dan keadaan langsung dalam tingkat ini. Sebagai contoh, seorang *editor* yang memprioritaskan cerita yang selaras dengan nilai-nilai inti sebuah berita atau preferensi pembaca.
- *Mesosystem* (Kumpulan Konteks Langsung), tingkat ini melibatkan interaksi antar mikrosistem. Misal, hubungan antara ruang redaksi dan tim *marketing* atau antara meja berita yang berbeda yang dapat memengaruhi cerita atau informasi mana yang akan disampaikan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan

bagaimana mikrosistem yang berbeda saling memengaruhi dan secara kolektif berdampak pada individu.

- *Exosystem* (Standar Kelembagaan Eksternal), mencakup lembaga eksternal dan struktur sosial yang tidak secara langsung melibatkan individu, namun tetap memengaruhi lingkungannya, seperti kebijakan organisasi, peraturan media, atau kebijakan pemerintah daerah. Pengaturan ini secara tidak langsung membentuk perilaku dengan memengaruhi mikrosistem. Misal, sensor pemerintah yang ketat dapat membatasi apa yang dapat dipublikasikan oleh seorang jurnalis.
- *Macrosystem* (Budaya), merupakan tingkat terluas yang mencakup nilai-nilai budaya, kepercayaan, norma, hukum, dan ideologi masyarakat yang mendasari dan memengaruhi semua tingkat lainnya. Hal ini menciptakan konteks keseluruhan di mana semua sistem lain beroperasi.

Teori Lewin menekankan bahwa keputusan penjaga gerbang dibentuk oleh perilaku yang dihasilkan dari interaksi faktor-faktor di semua tingkatan ini. Faktor-faktor ini secara kolektif menentukan informasi apa yang disampaikan kepada publik dan bagaimana informasi itu dibingkai, menunjukkan bagaimana bidang sosial memengaruhi perilaku penjaga gerbang.

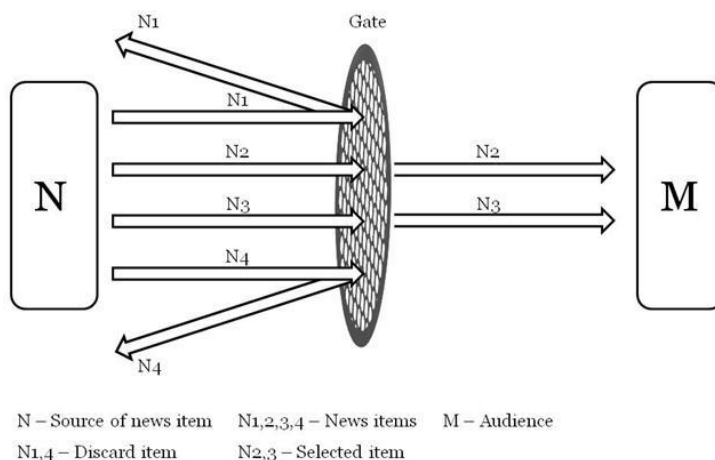
Adaptasi selanjutnya oleh Shoemaker dan Reese yang mengidentifikasi dan memperluas kerangka ini menjadi lima tingkatan yang disebut dengan Perspektif Hierarki Pengaruh Media (*Hierarchy of Influence*) (Shoemaker & Reese, 1996), yaitu:

- *Individual Level*, berfokus pada karakteristik, sikap, dan keputusan penjaga gerbang individu, seperti jurnalis atau pengguna media sosial. Tingkat ini menguji bagaimana faktor pribadi memengaruhi informasi apa yang melewati gerbang.
- *Communication Routines*, melihat pada praktik, rutinitas, dan norma profesional yang menjadi kebiasaan yang membentuk keputusan penjaga gerbang, seperti nilai berita dan standar jurnalistik.
- *Organizational Level*, mempertimbangkan struktur, kebijakan, dan praktik dalam organisasi, seperti kebijakan manajemen media atau visi misi organisasi yang memengaruhi perilaku penjaga gerbang.
- *Social Institutions*, tingkat ini menjelaskan bahwa media beroperasi di dalam lingkup institusi sosial yang lebih besar seperti

pemerintah, lembaga ekonomi, partai politik, lembaga pendidikan, maupun organisasi budaya. Interaksi dengan institusi-institusi ini membentuk batasan dan peluang bagi media yang dapat memberikan tekanan atau memengaruhi penjaga gerbang organisasi.

- *Social System*, pada tingkatan ini, media dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas yang terdiri atas norma, nilai, ideologi, dan budaya masyarakat. Isi media menjadi cerminan sekaligus instrumen dalam mempertahankan stabilitas sosial dan ideologi dominan.

Di samping itu, David Manning White menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran Kurt Lewin terkait teori *Gatekeeping*. White mengatakan bahwa *gatekeeping* adalah “A case study in the selection of news in Journalism Quarterly”. Hal tersebut merujuk pada sebuah studi kasus yang dilakukan dalam bidang jurnalisme, terutama dalam konteks pemilihan berita. Dalam jurnalisme, pemilihan berita (*news selection*) adalah proses memilih, menyusun, dan mengatur berita-berita yang akan disampaikan kepada masyarakat (Sitorus dkk., 2022).



Gate Keeping Theory

Gambar 5 Model Gatekeeper oleh David Manning White (Sim dkk., 2019)

Model *gatekeeper* White dalam (Soehoet, 2002) menyebutkan bahwa informasi selalu mengalir sepanjang saluran-saluran tertentu yang memiliki “wilayah berpintu” dimana pengambil keputusan itu dilaksanakan pribadi oleh

penjaga pintu (*gatekeeper*), mengenai apakah informasi atau barang diizinkan masuk/lewat saluran tersendiri. Model *gatekeeper* yang dimaksud adalah seperti pada Gambar 12.

Model *gatekeeper* di atas menunjukkan bahwa dari sejumlah informasi atau pesan dari empat informasi atau pesan (N1, N2, N3 dan N4) yang dialirkan melalui pintu (*gate*) hanya N2 dan N3 yang lolos. Informasi atau pesan yang lolos dapat merupakan penggabungan dari empat pesan menjadi dua pesan sebagaimana yang digambarkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *gatekeeper* memiliki dua fungsi dalam rangka penyebaran informasi atau pesan, yaitu fungsi penyaringan dan fungsi formulasi informasi.

Sementara itu, (Effendy & Surjaman, 2011) membagi proses komunikasi dalam dua perspektif, yaitu perspektif psikologis dan perspektif mekanistik. Perspektif psikologis terjadi pada diri komunikator dan komunikan. Proses ini terjadi ketika seorang komunikator berniat untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses. Selain itu, perspektif mekanistik berlangsung ketika komunikator mengirimkan pesan sampai diterima oleh komunikan.

Dalam pelaksanaannya, perspektif mekanistik diklasifikasikan menjadi proses komunikasi secara primer dan secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang (simbol) sebagai media atau saluran. Kemudian, proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.

Suatu organisasi komunikasi dapat berlangsung secara internal dan eksternal. Bentuk komunikasi internal dapat dijumpai dalam bentuk pengiriman pesan-pesan melalui saluran di dalam satu organisasi, seperti pemberian memo, rapat, percakapan melalui telepon, dan lain-lain baik formal maupun tidak formal. Di samping itu, bentuk komunikasi eksternal dijumpai dalam bentuk pertukaran informasi yang bermakna melalui pengiriman pesan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya termasuk di dalamnya adalah individu yang tidak termasuk dalam bagian organisasi namun memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan suatu organisasi.

Hal yang dapat disimpulkan adalah adanya kemungkinan suatu informasi sebelum disebarkan terlebih dahulu dilakukan penyeleksian

terhadap suatu pesan sebelum disebarkan ke pihak lain atau tahap berikutnya. Penyeleksian itu sendiri dapat disebabkan oleh banyak hal, satu di antaranya adalah penyeleksian berdasarkan kepentingan penyeleksinya.

Selanjutnya, Pamela J. Shoemaker dan Timothy Vos dalam *Gatekeeping Theory* memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan menjelaskan bahwa keputusan media (termasuk televisi) tidak hanya dipengaruhi individu seperti *editor* atau produser, namun juga oleh rutinitas organisasi, tekanan eksternal, hingga ideologi makro yang melingkupinya (Shoemaker & Vos, 2009).

Seiring dengan berkembangnya zaman, Barzilai-Nahon mengembangkan *Network Gatekeeping Theory* (NGT) untuk memahami proses kontrol informasi dalam ekosistem media yang lebih kompleks. *Network gatekeeping* merupakan perluasan dari teori *gatekeeping* tradisional yang menyesuaikan dengan dinamika media sosial dan jaringan digital. Dalam kerangka ini, proses pengendalian dan distribusi informasi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan hierarkis yang dikelola oleh sejumlah kecil *gatekeeper* (seperti editor atau jurnalis), melainkan sebagai proses yang tersebar dan dilakukan oleh berbagai aktor dalam jaringan yang kompleks (Barzilai-Nahon, 2008).

Barzilai-Nahon memperkenalkan konsep baru berupa *gate*, *gated*, dan *gatekeeper*, dimana *gate* merujuk pada titik atau jalur masuk/keluar informasi yang menjadi pusat proses penyaringan, seperti platform digital, algoritma atau individu, sementara *gated* adalah entitas atau konten yang dikendalikan (pihak yang dipengaruhi oleh keputusan *gatekeepers*), dan *gatekeeper* adalah aktor yang memiliki kekuasaan untuk menyaring, memanipulasi, atau mempertahankan aliran informasi tersebut (pihak yang memiliki otoritas untuk mengontrol arus informasi). Teori ini menegaskan bahwa *gatekeeping* tidak lagi hanya sebatas seleksi informasi yang layak disebarluaskan, namun mencakup mekanisme-mekanisme seperti (Barzilai-Nahon, 2008):

- *Lock-in*, merujuk pada kondisi ketika *the gated* (audiens atau pengguna) bergantung pada *gatekeeper* (penyaring informasi), sehingga mereka sulit berpindah ke sumber informasi lain. *Lock-in* terjadi dikarenakan keterbatasan alternatif, ketergantungan pada informasi yang disediakan atau ikatan sosial dan institusional dengan *gatekeeper*. Dalam konteks ini, *gatekeeper* memiliki kendali yang lebih besar karena *the gated* “terkunci” pada aliran informasi yang dikontrolnya.

- *Isolation*, menggambarkan mekanisme dimana *gatekeeper* dapat memisahkan atau membatasi akses informasi terhadap kelompok tertentu dari *the gated*. Isolasi ini dapat dilakukan dengan cara menutup akses, menyaring informasi tertentu, atau mendesain aliran informasi agar hanya bisa diakses sebagian audiens. Dengan isolasi, *gatekeeper* mampu mempertahankan otoritasnya atas distribusi informasi dan membentuk batas-batas akses dalam jaringan.
- *Flow*, merujuk pada arus informasi yang melewati gerbang (*gate*). *Flow* ini dapat masuk (*inflow*) atau keluar (*outflow*) dari jaringan informasi. *Gatekeeper* memiliki peran penting dalam mengatur arus tersebut dengan memutuskan informasi mana yang akan dilewatkan, ditahan, atau diubah sebelum sampai kepada *the gated*.

Dalam praktiknya, mekanisme ini memungkinkan berbagai aktor, seperti pengguna, algoritma, dan platform digital untuk secara aktif mengontrol, merekayasa, atau membatasi penyebaran konten sesuai kepentingan tertentu. *Network gatekeeping* memperlihatkan bahwa proses pengendalian informasi di era digital bersifat dinamis dan tersebar di berbagai level, bukan lagi terbatas pada keputusan satu otoritas atau institusi. Pendekatan yang dilakukan Barzilai-Nahon ini sangat penting untuk digunakan dalam memahami bagaimana informasi dipilih, dipertahankan, dan disebarluaskan di dalam ekosistem media sosial dan jaringan digital modern, dimana berbagai aktor saling berinteraksi dan memiliki peran sebagai *gatekeeper*.

Di era digital seperti saat ini, *gatekeeping* berfungsi untuk menjaga kualitas informasi yang disebar. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketika *gatekeepers* cermat dalam menyeleksi informasi, konten positif lebih mungkin untuk tersebar, sedangkan ketidakpedulian dalam proses ini dapat menyebabkan penyebaran informasi negatif atau hoaks (Muannas, 2018).

Teori *gatekeeping* yang terus berkembang menggambarkan proses kompleks dimana informasi diseleksi dan disaring melalui berbagai lapisan, baik oleh individu maupun oleh struktur organisasi. Dengan perkembangan teknologi dan media sosial, peran *gatekeeper* semakin beragam, menciptakan tantangan baru dalam menjaga integritas dan kualitas informasi yang sampai kepada masyarakat (Wallace, 2017).

TVRI sebagai media tradisional harus dapat berperan aktif dalam menyaring dan mendistribusikan informasi walaupun saat ini audiens berperan tidak hanya menerima informasi tetapi juga berkontribusi dalam proses seleksi. TVRI berperan sebagai *gatekeeper* yang bertanggung jawab untuk memastikan akurasi dan relevansi berita sebelum disampaikan kepada publik dengan menyaring informasi yang masuk dan memverifikasi kebenarannya, sehingga dapat mengurangi resiko penyebaran berita palsu.

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa adanya upaya atau strategi dari TVRI Sulawesi Selatan untuk menarik penonton, dimana dengan cara mempublikasikan dan menginformasikan konten – konten yang berupa informasi dan hiburan kepada khalayak melalui media sosial seperti *website*, *youtube*, *Instagram*, *twitter* dan *tiktok* (Fitrih dkk., 2022). Dalam hal meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sulawesi Selatan memiliki banyak peluang untuk merebut perhatian penonton dikarenakan memiliki banyak pemancar yang menjangkau hampir setiap kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Peluang tersebut didukung dengan adanya infrastruktur teknologi penyiaran yang memadai dan mendukung proses informasi dan sumber berita dari berbagai daerah.

Tantangan yang dihadapi TVRI Sulawesi Selatan adalah dalam menyajikan program berkualitas yang menarik perhatian penonton dari segala usia dan merubah perspektif masyarakat, karena ada beberapa pola pikir masyarakat yang masih menganggap TVRI sebagai televisi kuno dan kurangnya minat remaja terhadap siaran tersebut (Fitrih dkk., 2022). Penyajian program berkualitas juga menjadi dasar dalam melakukan pemetaan pola acara di TVRI Sulawesi Selatan. Hal tersebut yang akan dianalisis prosesnya dalam penelitian ini.

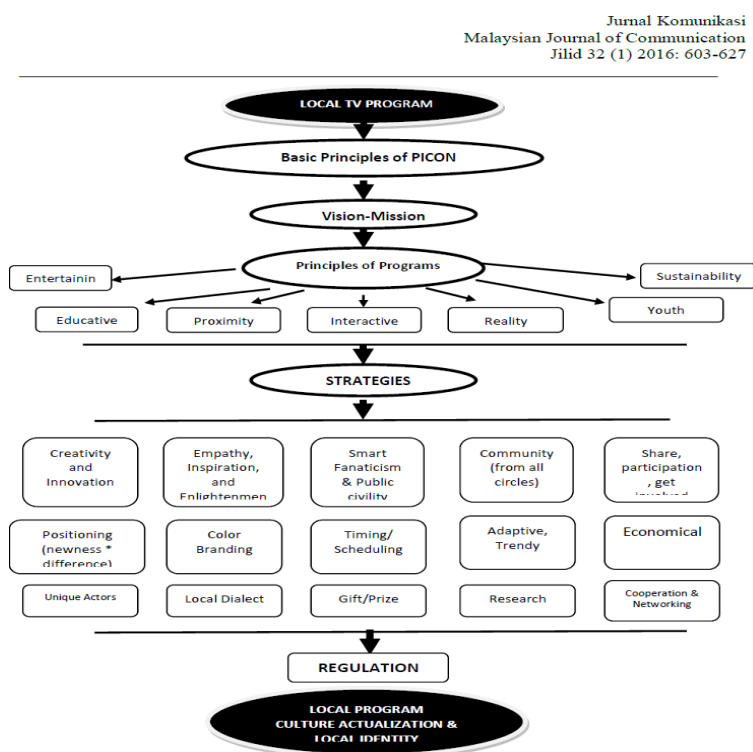
Penelitian mengenai strategi *programming* telah dilakukan sebelumnya dan ditemukan bahwa mengangkat kebudayaan lokal sebagai tema atau konten siaran menjadi salah satu strategi *programming* untuk dapat mempertahankan penonton dalam melihat program acara televisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi TVRI Riau-Kepri untuk mempertahankan budaya daerahnya adalah dengan menyiarkan film dokumenter yang menampilkan bangunan melayu, fungsinya, dan asal usulnya serta dalam mempertahankan hukum adat melayu adalah dengan menampilkan program siaran dengan mengundang narasumber yang paham mengenai hukum adat melayu tersebut (Anggraini & Kurniadi, 2020). Strategi

ini dapat pula diterapkan di TVRI stasiun daerah lainnya sebagai upaya untuk mengangkat dan mempertahankan budaya dari masing-masing daerah.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Wardah dkk., 2023) mengenai Manajemen Program Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kualitas Siaran dimana Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sulawesi Selatan telah menjalankan strategi manajemen program secara menyeluruh dari tahap perencanaan, produksi dan pembelian program, eksekusi program, serta *monitoring* dan evaluasi program di tahun 2023. Hal ini juga menjadi acuan untuk penulis dalam menyusun proposal penelitian ini dengan tujuan mengetahui strategi pola acara siaran lokal yang diterapkan oleh TVRI Sulawesi Selatan di masa sekarang dikarenakan acara yang disiarkan sudah berbeda dengan tahun 2023. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tersebut juga didukung oleh dukungan proses yang terarah dan terukur, sehingga mampu menghasilkan konten lokal yang informatif, edukatif, dan menghibur meskipun menghadapi berbagai keterbatasan (Wardah dkk., 2023).

Selain menjadikan TVRI stasiun daerah lain sebagai acuan, TVRI Sulawesi Selatan juga dapat mengacu pada televisi stasiun swasta seperti Metro TV dalam penyajian program-program acaranya. Penelitian mengenai Strategi Programming Program “Metro Pagi Primetime” dalam Mempertahankan Rating menemukan bahwa strategi *programming* seperti *selection*, *scheduling*, *promotion* dan *evaluating* telah dilakukan oleh tim *Programming* Metro tv khususnya dalam program Metro Pagi Primetime (Putra dkk., 2019). Penempatan acara di pagi hari dikarenakan mengejar kebaruan berita yang akan diberikan kepada penonton serta pengemasan konten yang menarik menjadikan program ini sebagai program unggulan. Produksi program Metro Pagi Primetime menggunakan pendekatan baru dalam pembuatan konten, yaitu mengemas konten dalam bentuk visual. Dalam penelitian menunjukkan bahwa mengemas konten dalam bentuk visual meningkatkan *rating* program dikarenakan masyarakat lebih menyukai dan cepat tanggap terhadap informasi visual dibandingkan kata-kata yang sulit diingat (Putra dkk., 2019). Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa program Metro Pagi *Primetime* telah mengikuti strategi *programming* menurut Eastman & Ferguson sehingga menghasilkan hasil *rating* yang bagus (Putra dkk., 2019). Strategi *programming* yang dimaksud di dalamnya meliputi *selecting*, *scheduling*, *promotion* dan *evaluation* (Eastman & Ferguson, 2013).

Selanjutnya, dalam penelitian *Principles and Strategies of Creative Broadcasting Program for Indonesian Local TV* ditemukan bahwa program acara kreatif dapat dibangun dengan tujuh prinsip yaitu *entertaining, educating, reality, proximity, interactive, youth, and sustainable* serta dengan mengembangkan strategi menggunakan *creativity, empathetic, fanaticism, community, sharing and participation, positioning, branding-color, scheduling, unique actor, local dialect, gifts, research, networking, and economy* (Abdussalam & Wahyudi, 2016). Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan prinsip dasar PICON "Public Interest, Convenience, and Necessity" sebagai dasar yang dapat digunakan dalam *public broadcasting* (Napoli, 2001) dan membuatnya ke dalam bentuk diagram seperti di bawah ini.



Gambar 6 Diagram PICON dalam strategi penyusunan program televisi

Sumber: Abdussalam, S., & Wahyudi, M. (2016). Principles and strategies of creative broadcasting program for indonesian local tv: A descriptive study. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 32(1), 207–231.
<https://doi.org/10.17576/jkmjc-2016-3201-28>

Kelima penelitian sebelumnya di atas menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hal yang sama yaitu *programming*. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis terhadap bagaimana TVRI Sulawesi Selatan melakukan pemetaan pola acara sebagai strategi *programming* yaitu *selecting* dan *scheduling* (Eastman & Ferguson, 2013). Penelitian ini dilakukan dengan lebih berfokus pada strategi pola acara dan bagaimana pola acara yang disusun dapat meningkatkan kualitas tayangan dan relevansi program dengan audiens lokal. Ini menjadikannya lebih spesifik pada penyusunan program siaran sebagai bagian dari strategi *programming* yang lebih luas. Penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan lebih membahas mengenai konten atau kebijakan umum lembaga penyiaran publik, namun kurang dalam menganalisis bagaimana pola acara dikonstruksi untuk merefleksikan dan memperkuat identitas budaya daerah secara strategis. Selain itu, penelitian yang sudah ada hanya melakukan fokus kepada satu program acara sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses pengembangan penelitian ilmiah terutama mengenai penyiaran publik.

Berikut ini adalah matriks persamaan dan perbedaan dari kelima penelitian terdahulu.

Tabel 1 Matriks Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Fitrih Fitrih; Abdul Majid; Muhammad Idris	2022	<i>South Sulawesi TVRI Communication Strategy in Improving Existence as a Public Broadcasting Institution in The Digital Era</i>	Kualitatif Deskriptif dengan Wawancara (5 informan), observasi, dan dokumentasi (selama 1 bulan di kantor TVRI Sulsel)	TVRI Sulsel menerapkan strategi komunikasi yang efektif dengan mengubah pola acara dan mengoptimalkan penggunaan media sosial. Meskipun memiliki banyak pemancar dan jangkauan luas, tantangan utama adalah persepsi masyarakat terhadap TVRI yang dianggap usang. Untuk mengatasi hal ini, TVRI Sulsel perlu berinovasi agar tetap relevan di era digital.	Lokasi Penelitian sama yaitu di TVRI Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus penelitian pada Strategi Pola Acara

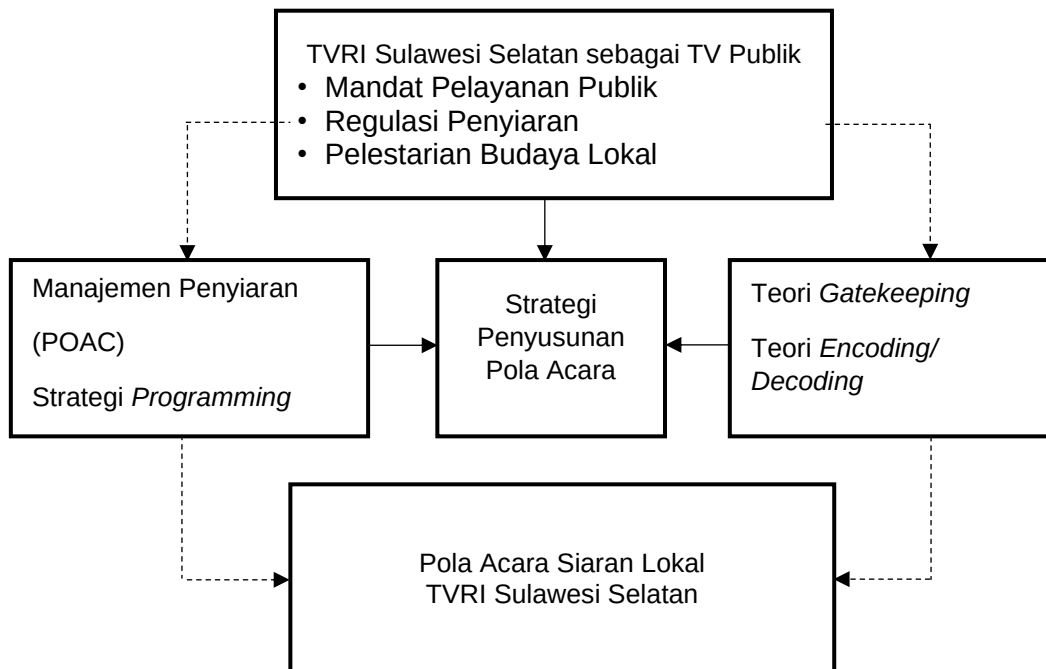
Dewi Anggraini; Hayatullah Kurniadi	2020	Strategi TVRI Riau-Kepri Dalam Membangun Budaya Daerah Melalui Program Siaran Budaya Melayu	Kualitatif (deskriptif) dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen	TVRI Riau-Kepri berhasil menjalankan strategi budaya Melayu dengan membuat program talkshow budaya, dokumenter tentang kuliner, dan busana Melayu dengan melibatkan budaya lokal dalam acara-acaranya, TVRI Riau-Kepri berusaha melestarikan nilai budaya lokal serta memperkenalkan budaya Melayu kepada audiens lebih luas.	Fokus penelitian pada Lembaga Penyiaran Publik dan strategi acara	Variabel Penelitian tidak hanya di satu program acara namun seluruh program acara
Wardah; Syukri; W. O. N. Asyifah	2023	Manajemen Program Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Selatan Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran	Kualitatif (deskriptif) dengan wawancara (pejabat bidang program yang paling mengetahui strategi), observasi, dan dokumentasi	Manajemen program di TVRI Sulsel mengacu pada perencanaan matang, pengorganisasian yang baik, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas siaran. Program-program yang disusun lebih terfokus pada kebutuhan audiens lokal. Salah satu temuan utama adalah peningkatan kualitas	Lokasi Penelitian sama yaitu di TVRI Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini lebih umum membahas strategi manajerial dalam pengelolaan program siaran, bukan hanya pola acara itu sendiri

				siaran yang berhasil diterapkan melalui peningkatan konten dan penggunaan teknologi baru.		
Adi Pratama Putra; Zaenina Shintya; Melisa Arisanty	2019	Strategi <i>Programming</i> Program Metro Pagi <i>Primetime</i> (dalam mempertahankan <i>Rating</i>)	Kualitatif (studi kasus, paradigma interpretatif) dengan wawancara mendalam (<i>key informants</i> : manajer <i>programming</i> , <i>executive producer</i> & <i>producer</i> Metro Pagi <i>Primetime</i>), dan analisis dokumen	Metro Pagi <i>Primetime</i> menggunakan strategi <i>programming</i> berbasis pada proses seleksi, penjadwalan, promosi, dan evaluasi untuk memastikan bahwa program tetap relevan dan menarik bagi audiens. Program ini berfokus pada konten yang dekat dengan audiens dan menambahkan elemen visual animasi untuk menarik perhatian. Evaluasi rutin terhadap <i>rating</i> dan <i>feedback</i> audiens diterapkan untuk meningkatkan kualitas.	Fokus penelitian di bidang penyiaran televisi dan menggunakan metode kualitatif	Penelitian lebih berorientasi pada peningkatan <i>rating</i> di pasar <i>primetime</i> nasional, dengan memperhatikan faktor-faktor teknis dan strategis dalam mempertahankan audiens.

Surokim Abdussalam; Muhtar Wahyudi	2016	<i>Principles and Strategies of Creative Broadcasting Program for Indonesian Local TV: A Descriptive Study</i>	Kualitatif (deskriptif, paradigma konstruktivis) dengan wawancara, observasi, dan FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	Penelitian ini menemukan bahwa prinsip dasar dalam pengembangan program TV lokal yang kreatif meliputi: menghibur, mendidik, berbasis realitas, kedekatan dengan audiens, interaktif, berorientasi pada kaum muda, dan berkelanjutan. Strategi untuk meningkatkan daya saing TV lokal melibatkan kreativitas konten, branding, penjadwalan yang optimal, dan pemanfaatan dialek lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, TV lokal dapat lebih kompetitif dan membangun identitas budaya daerah.	Fokus penelitian di bidang penyiaran televisi dan menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini menyusun prinsip-prinsip kreatif dan strategi pengembangan program yang dapat diterapkan oleh stasiun TV lokal untuk bersaing di pasar media global. Penelitian ini berfokus pada aspek kreativitas dan pengembangan konten yang berfokus pada audiens lokal dan nasional.
------------------------------------	------	--	---	--	---	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 7 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Penelitian ini diawali dari pemahaman bahwa TVRI Sulawesi Selatan merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang menjalankan mandat pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai televisi publik, TVRI Sulawesi Selatan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan siaran yang bersifat independen, netral, tidak komersial, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Mandat tersebut tercermin dalam fungsi penyiaran yang meliputi penyediaan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta pelestarian budaya lokal.

Dalam konteks tersebut, strategi pola acara siaran lokal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas teknis penjadwalan program, melainkan sebagai bagian dari strategi komunikasi institusional yang merepresentasikan identitas TVRI Sulawesi Selatan sebagai entitas televisi publik. Pola acara menjadi instrumen utama bagi TVRI Sulawesi Selatan dalam menerjemahkan mandat pelayanan publik, regulasi penyiaran, dan komitmen terhadap pelestarian budaya lokal ke dalam praktik penyiaran yang konkret.

Kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan manajemen penyiaran sebagai mekanisme struktural yang mengelola mandat tersebut. Manajemen penyiaran dipahami melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan (POAC), yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pengendalian pola acara siaran lokal. Selanjutnya, proses penyusunan pola acara dianalisis melalui strategi *programming*. Strategi *programming* digunakan untuk menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan operasional dilakukan dalam memilih jenis program, menentukan komposisi konten siaran lokal, serta mengatur penempatan waktu siar program. Dalam konteks televisi publik, strategi *programming* tidak berorientasi pada pencapaian *rating* semata, melainkan pada pemenuhan kebutuhan informasi, edukasi, budaya, dan hiburan masyarakat lokal.

Strategi *programming* tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan proses *gatekeeping*. Teori *gatekeeping* dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana proses seleksi dan pengendalian konten dilakukan pada tingkat institusional. Proses ini melibatkan berbagai aktor internal TVRI Sulawesi Selatan yang berperan sebagai penjaga gerbang dalam menentukan konten siaran yang sesuai dengan mandat televisi publik dan nilai budaya lokal.

Lebih lanjut, kerangka pemikiran ini juga menggunakan perspektif teori *Encoding/Decoding* untuk memahami pola acara sebagai proses pengkodean (*encoding*) nilai-nilai publik, budaya lokal, dan identitas kelembagaan TVRI Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, pola acara dipandang sebagai teks institusional yang merepresentasikan ideologi pelayanan publik dan pilihan strategis TVRI Sulawesi Selatan dalam menghadapi tantangan industri media dan perkembangan media digital. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada proses *decoding* oleh audiens, melainkan pada bagaimana institusi media mengonstruksi makna melalui kebijakan penyiaran.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini memandang pola acara siaran lokal TVRI Sulawesi Selatan sebagai hasil dari interaksi antara mandat televisi publik, manajemen penyiaran, strategi *programming*, proses *gatekeeping*, dan proses *encoding* nilai-nilai publik. Kerangka ini menjadi landasan analitis dalam menelaah strategi pola acara siaran lokal TVRI Sulawesi Selatan serta perannya dalam memperkuat eksistensi TVRI sebagai televisi publik daerah.